

PENDIDIKAN dan KEMISKINAN
STUDI KASUS PROVINSI MALUKU UTARA

Education and Poverty
Case Study of Maluku Utara

Harry Nurdyana S.¹, Dr. Budiono, SE, MA², Dr. Mohamad Fahmi, SE, MT²

¹ **BPS Kota Ternate**

² **Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran**

OKTOBER 2012

Abstract

This study aimed to determine the effect of educational on poverty in Maluku Utara at 2010. The size of the data used for 3.702 Susenas household sample conducted by BPS at 2010.

The analysis model used is the probit model with the dependent variable in the form of poverty. The poverty rate is measured from the average per capita expenditure per month is limited by the Poverty Line. If the average monthly per capita expenditure below the poverty line, the household is considered poor households. Conversely, if the monthly per capita expenditure above the poverty line households are categorized as non-poor households.

The results of this study was education significant and negative to poverty in Maluku Utara. Another significant variable was age of household head, village classification, number of household members with age under 15 years and head of household work in the agricultural sector, the influence positive. Variable number of child under 3 person, the influence negatively. While the other variables were not significant.

Keyword : Education, Poverty, Probit Model

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Sejalan dengan itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Programme (UNDP) mencantumkan poin pertama dari Tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah : Memberantas kemiskinan dan kelaparan.

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat miskin. Sedangkan di Indonesia permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Di mana biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktifitas dan juga lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1
Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin, klasifikasi daerah dan ijazah tertinggi yang dimiliki, di Provinsi Maluku Utara, tahun 2010.

Ijazah Tertinggi	Perkotaan		Perdesaan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak Punya Ijazah SD	22.84	21.68	32.68	34.96
SD/Sederajat	18.16	25.19	30.00	33.30
SMP/Sederajat	20.21	19.26	17.28	16.02
SMA/Sederajat	30.33	25.40	16.79	11.81
D1/D2	0.68	2.41	1.07	1.68
D3	1.00	1.31	0.43	0.72
D4+	6.78	4.75	1.75	1.51
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS, Susenas KOR Juli 2010

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Maluku Utara yang berumur 10 tahun ke atas di daerah perkotaan maupun perdesaan masih banyak yang tidak memiliki ijazah, di perkotaan di atas 20 persen dan di perdesaan di atas 30 persen. Artinya penduduk Provinsi Maluku Utara masih banyak yang belum pernah sekolah atau tidak pernah menamatkan sekolah di tingkat sekolah dasar. Di daerah perkotaan presentase penduduk terbanyak untuk laki-laki memiliki ijazah SMU/ sederajat (30,33 %) begitu juga perempuan terbanyak memiliki ijazah SMU/ sederajat (25,40 %). Sedangkan di daerah perdesaan baik laki-laki maupun perempuan persentase terbanyak adalah penduduk yang tidak punya ijazah SD. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Provinsi Maluku Utara khususnya di daerah perdesaan masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan.

Dari uraian di atas dapat disebutkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa besarnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, PBB menuangkannya dalam 8 tujuan pembangunan milenium pada butir ke 2 yaitu mencapai pendidikan dasar universal (UN, 2011).

Indeks pendidikan menjadi salah satu indeks dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk meningkatkan IPM di suatu wilayah maka harus meningkatkan Indeks Kesehatan atau Indeks Pendidikan atau Indeks Kemampuan Daya Beli. Dengan pendidikan yang semakin tinggi maka IPM sebuah daerah akan semakin tinggi pula.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Van Den Berg (2001) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan istilah yang terkait pengertian relatif maupun absolut. Seseorang atau sebuah keluarga dianggap miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan orang lain dalam perekonomian. Kemiskinan juga dapat dilihat sebagai beberapa tingkat absolut pendapatan atau standar hidup, biasanya pada atau dekat dengan sekedar menyambung hidup secara minimum.

Opini publik yang patut dibenarkan adalah bahwa kemiskinan bisa menutup akses kemajuan seseorang, termasuk salah satunya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya (Wahid, 2008).

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat miskin (Carey, 2002). Sedangkan di Indonesia permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Di mana biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

Kebijakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, adalah: (1) menaikkan anggaran yang berkaitan (langsung/tidak langsung) melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, (2) mendorong APBD Provinsi, Kabupaten dan kota untuk program yang terkait, (3) tetap mempertahankan program lama dan (4) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Instrumen utama melalui program PNPM-Mandiri, pengembangan bahan bakar nabati, keluarga harapan serta permodalan melalui kredit mikro (Royat, 2009).

Beberapa anggaran pengentasan kemiskinan disalurkan melalui berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, bantuan sekolah/pendidikan, bantuan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan pemberian kredit mikro. Semua program tersebut umumnya bertitik tolak dari paradigma pendapatan (income) sebagai patokan dalam memberantas kemiskinan. Namun dalam realitasnya, tingkat kemiskinan dan pengangguran belum menunjukkan penurunan yang cukup signifikan (LIPI, 2007).

Perbaikan dan peningkatan akses pendidikan secara gratis adalah salah satu kunci mengatasi masalah rumit pendidikan dan kemiskinan ini. Mengapa pendidikan ini penting untuk mengatasi kemiskinan? Mengutip hasil penelitian Denison (1962) dan Solow (1957), Todaro menyebutkan bahwa sumber utama dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara-negara maju saat ini bukanlah physical capital, melainkan human capital.

Terdapat suatu fakta empiris yang penting bahwa tambahan terhadap *human capital* dapat meningkatkan pendapatan individu di masa yang akan datang (Nicholson, 1992). Investasi di sektor

sumber daya manusia tidak akan membawa pengaruh yang signifikan tanpa diimbangi dengan investasi fisik berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

Schultz (1971) menyatakan bahwa ada lima cara pengembangan sumber daya manusia, yaitu : (1) fasilitas dan pelayanan masyarakat, pada umumnya mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat; (2) latihan jabatan, termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan; (3) pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi; (4) program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstensi, khususnya pada pertanian; (5) migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

Kemiskinan yang disebabkan oleh produktivitas rendah dapat diatasi dengan kebijakan intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dalam bentuk program peningkatan produktivitas, sementara itu, kerapuhan dalam pendapatan kaum miskin dapat diatasi dengan kebijakan jaringan pengaman sosial jangka pendek baik dalam bentuk tunai atau bahan makanan, upaya perbaikan sistem pendapatan, atau penciptaan kesempatan dalam memperoleh pendapatan. Terakhir, kemiskinan yang disebabkan oleh ketergantungan akibat ketidakmampuan fisik, mental, usia lanjut, kebijakan yang tepat adalah dengan membangun sistem kesejahteraan sosial (*social welfare*) antara lain melalui program semacam bantuan tunai langsung.

Pengukuran Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS, 2011).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk} \quad (1)$$

Di mana :

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$F_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}} \times 2100 \quad (2)$$

Di mana :

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

- V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.
 F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengdiami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i V_i \quad (3)$$

Di mana:

- NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).
 V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).
 r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).
 i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.
 p = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

Kajian Empiris

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, sebagai berikut :

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2011).

Todaro & Smith (2003) membagi kemiskinan berdasarkan penyebabnya menjadi kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kegagalan individu dan atau lingkungan fisik sebagai objeknya hingga seseorang menjadi sulit dalam melakukan usaha atau mendapatkan pekerjaan. Kemiskinan struktural melihat kemiskinan sebagai bagian relatif, di mana terdapat sekelompok masyarakat yang miskin sementara kelompok lainnya tidak miskin. Sedangkan kemiskinan berdasarkan keparahan dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya).

Van Den Berg (2001) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan istilah yang terkait pengertian relatif maupun absolut. Seseorang atau sebuah keluarga dianggap miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan orang lain dalam perekonomian. Kemiskinan juga dapat dilihat sebagai beberapa tingkat absolut pendapatan atau standar hidup, biasanya pada atau dekat dengan sekedar menyambung hidup secara minimum.

Mankiw (2010) menyatakan bahwa sebagian besar orang akan menyukai untuk meningkatkan jumlah dan kualitas barang dan jasa yang mereka konsumsi. Namun demikian, pendapatan seseorang yang kurang akan menjadi batasan bagi orang tersebut untuk mengkonsumsi barang dan jasa lebih sedikit dari yang diinginkan. Dengan kata lain, konsumen menghadapi sebuah keterbatasan berapa banyak yang mereka dapat belanjakan, yang disebut keterbatasan anggaran.

Beberapa kajian empiris sebelumnya yang terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan adalah Gan & Sanyal (2010), Alemayehu Geda (2005), Weri Nova Afandi (2011), Gaurav Datt & Dean Jolliffe (1999) dan Woolard I. & S. Klasen (2004).

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan data mikro berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli 2010. Survei ini dilakukan di wilayah perkotaan dan perdesaan yang berada di tujuh kabupaten dan dua kota yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku Utara. Cakupan data yang dikumpulkan terdiri dari 3.702 rumah tangga sampel atau sebanyak 17.695 orang.

Model dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode probit model karena variabel tergantungnya yaitu tingkat kemiskinan merupakan variabel dummy berdasarkan jumlah pengeluaran rumah tangga yang dibatasi oleh garis kemiskinan (GK). Ketika rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan perkapita berada di bawah garis kemiskinan diberi tanda 1 dan ketika sebaliknya diberi tanda 0.

Regresi Probit adalah salah satu model regresi yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang bersifat biner. Pada model ini fungsi transformasi yang memetakan fungsi linier $x'\beta$ pada selang (0,1) adalah fungsi kumulatif sebaran normal.

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Miskin} = \alpha + \beta_1 \text{Year_Schooling} + \beta_2 \text{d_Perempuan} + \beta_3 \text{Anak}_2 + \beta_4 \text{Umur} + \beta_5 \text{Umur_Sqr} + \beta_6 \text{Klas_Desa} + \beta_7 \text{U}_15 + \beta_8 \text{U}_60 + \beta_9 \text{d_Pertanian} + \beta_{10} \text{d_Tdk_Kerja} + \varepsilon \quad (4)$$

Untuk memberi kejelasan terhadap variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan variabel penelitian sebagai berikut :

- D_Miskin adalah dummy variabel kemiskinan yang dihitung dari jumlah pengeluaran perkapita perbulan dengan batasan garis kemiskinan (GKM + GKNM) pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010. 1 jika berada di bawah garis kemiskinan, 0 jika berada di atas atau sama dengan garis kemiskinan.
- Year_Schooling adalah variabel pendidikan yaitu lama sekolah yang dimiliki kepala rumah tangga. Jika partisipasi sekolah adalah tidak/belum pernah sekolah (dalam Susenas berkode 1), maka lama sekolah adalah 0 tahun. Jika partisipasi sekolah adalah sedang bersekolah (dalam Susenas berkode 2), maka dilihat jenis pendidikan tertinggi yang sedang diduduki dan tingkat/kelas yang sedang diduduki. Apabila masih bersekolah pada tingkat SD atau sederajat maka lama sekolah adalah jumlah tingkat/kelas yang sedang diduduki, sedangkan SLTP atau sederajat maka lama sekolah adalah 6 tahun ditambah tingkat/kelas yang sedang diduduki, perhitungannya berlaku juga untuk tingkat SLTA dan sarjana. Jika partisipasi sekolah adalah

tidak bersekolah lagi (dalam Susenas berkode 3), maka dilihat jenis pendidikan tertinggi yang pernah diduduki. Untuk SD atau sederajat maka lama sekolah adalah 6 tahun. Untuk SLTP atau sederajat maka lama sekolah adalah 9 tahun. Untuk SLTA atau sederajat maka lama sekolah adalah 12 tahun. Untuk sarjana S-1 adalah 16 tahun, S-2 adalah 18 tahun dan S-3 adalah 22 tahun.

- c. D_Perempuan adalah dummy variabel untuk jenis kelamin kepala rumah tangga, 1 untuk jenis kelamin kepala rumah tangga perempuan dan 0 laki-laki. Variabel ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh gender terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.
- d. Anak_2 adalah dummy variabel untuk jumlah anak, 1 jika jumlah anak kurang dari 3 orang, 0 jika jumlah anak lebih besar atau sama dengan 3 orang. Variabel ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari program keluarga berencana yaitu mempunyai anak maksimal 2 orang terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.
- e. Umur adalah variabel umur dari kepala rumah tangga yang dihitung dalam tahun.
- f. Umur_Sqr adalah variabel kuadrat umur dari kepala rumah tangga yang dihitung dalam tahun. Variabel ini digunakan karena variabel umur mempunyai fungsi yang tidak linear terhadap produktivitas seseorang. Bertambahnya umur seseorang akan meningkatkan produktivitas, tetapi pada umur tertentu produktivitas seseorang akan mencapai titik maksimum kemudian akan turun kembali, sehingga membentuk fungsi kuadrat.
- g. Klas_Desa adalah dummy variabel untuk klasifikasi wilayah tempat tinggal rumah tangga, 1 untuk wilayah perdesaan dan 0 untuk perkotaan. Daerah perkotaan dan daerah perdesaan memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda sehingga variabel ini diperlukan.
- h. U_15 adalah variabel untuk jumlah anggota rumah tangga yang berumur kurang dari 15 tahun. Menurut teori *dependency ratio* bahwa anggota rumah tangga yang berumur di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun merupakan usia tidak produktif dan menjadi beban tanggungan bagi anggota rumah tangga dengan usia produktif (umur 15 sampai 60 tahun). Sehingga variabel U_15 dan U_60 digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh anggota rumah tangga yang berusia tidak produktif berpengaruh terhadap kemiskinan.
- i. U_60 adalah variabel untuk jumlah anggota rumah tangga yang berumur lebih besar dari 60 tahun.
- j. d_Pertanian adalah dummy variabel tentang sektor usaha kepala rumah tangga, 1 untuk kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, 0 lainnya. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kebanyakan rumah tangga miskin bekerja pada sektor pertanian, untuk itu variabel ini digunakan dalam penelitian ini.
- k. d_Tdk_Kerja adalah dummy variabel tentang sektor usaha kepala rumah tangga, 1 untuk kepala rumah tangga yang tidak bekerja, 0 lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengolahan dengan menggunakan stata versi 11 terlihat pada tabel 2 di bawah ini :

Table 2
Faktor-faktor Penentu Kemiskinan dan Tingkat Signifikansinya
di Provinsi Maluku Utara

Variabel	Koefisien	Marginal Effect	Robust Standar Error
Komposisi Rumah tangga			
D_Perempuan	-0,0641	-0,0087	0,1239
Anak_2	-0,2512***	-0,0341	0,0811
Umur	-0,0154	-0,0021	0,0158
Umur_Sqr	0,0001	-0,0000	0,0002
U_15	0,2557***	0,0347	0,0277
U_60	0,0209	0,0028	0,0878

Pendidikan dan Pekerjaan			
year_schooling	-0,0665***	-0,0090	0,0104
d_Pertanian	0,3687***	0,0500	0,0839
d_Tdk_Kerja	0,2508	0,0340	0,1593
Domisili			
Klas_Desa	0,2504***	0,0339	0,0841

Variabel dasar yang digunakan untuk dummy variabel pekerjaan kepala rumah tangga adalah variabel non_pertanian.

Keterangan : *** signifikan pada tingkat 1%
 ** signifikan pada tingkat 5%
 * signifikan pada tingkat 10%
 n = 3.702
 Wald Chi² (10) = 301,20
 Prob > chi² = 0,0000
 Pseudo R² = 0,1652

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan) secara signifikan pada tingkat kepercayaan 1% adalah variabel pendidikan (year_schooling), jumlah anak kurang dari 3 orang (Anak_2), klasifikasi daerah tempat tinggal rumah tangga (Klas_Desa), jumlah anggota rumah tangga yang berumur di bawah 15 tahun (U_15) dan sektor usaha kepala rumah tangga di bidang pertanian (d_Pertanian). Variabel jenis kelamin kepala rumah tangga (d_Perempuan), variabel umur kepala rumah tangga (Umur), variabel kuadrat umur kepala rumah tangga (umur_sqr), variabel jumlah anggota rumah tangga yang berumur di atas 60 tahun (U_60) dan variabel kepala rumah tangga yang tidak bekerja (d_Tdk_Kerja) tidak memberikan hasil yang signifikan.

Tingkat pendidikan yang dihitung melalui tahun sekolah kepala rumah tangga mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini mengindikasikan pentingnya pendidikan dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya seperti dalam Mok dan A. Sanyal, Alemayehu Geda, dkk (2005), Weri Nova Afandi (2010), Datt & Jollife (1999), serta Woolard & Klasen (2004). *Marginal effect* pendidikan sebesar -0,0090 (tabel 4.4). Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa penambahan satu tahun sekolah kepala rumah tangga dari nilai rata-ratanya akan menurunkan peluang rumah tangga jatuh dalam kemiskinan sebesar 0,90 persen.

Variabel sektor usaha di bidang pertanian berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 1%. *Marginal effectnya* sebesar 0,0500 dan merupakan yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian akan berpeluang menjadi miskin sebesar 5 persen lebih besar dibandingkan dengan yang bekerja di sektor lainnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Geda, dkk (2005).

Variabel jumlah anggota rumah tangga yang berumur di bawah 15 tahun berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 1%. Nilai *marginal effectnya* sebesar 0,0347 (tabel 4.4). Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa penambahan satu orang jumlah anggota rumah tangga dengan umur di bawah 15 tahun dari nilai rata-ratanya akan meningkatkan peluang jatuh dalam kemiskinan sebesar 3,47 persen.

Variabel jumlah anak yang kurang dari 3 orang (Anak_2) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan serta signifikan pada level 1%. Besarnya *marginal effect* dari variabel tersebut adalah -0,0341. Hasil ini dapat diartikan bahwa rumah tangga dengan jumlah anak kurang dari 3 orang berpeluang 3,41 persen lebih kecil untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang jumlah anaknya lebih besar atau sama dengan 3 orang. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah cocok diterapkan di Provinsi Maluku Utara sehingga masyarakatnya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Variabel klasifikasi desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 1%. *Marginal effectnya* sebesar 0,0339. Hal ini sama dengan penelitian Geda, dkk (2005). Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa wilayah tempat tinggal rumah tangga di perdesaan akan lebih berpeluang menjadikan rumah tangga tersebut jatuh kedalam kemiskinan dibandingkan daerah perkotaan sebesar 3,39 persen.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian hipotesis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara adalah negatif dan signifikan pada level 1%. Besarnya *marginal effect* dari tingkat pendidikan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 0,90 persen. Dengan demikian peningkatan satu tahun umur sekolah kepala rumah tangga akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,90 persen.
2. Variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara adalah variabel pekerjaan kepala rumah tangga di sektor pertanian, jumlah anggota rumah tangga yang berumur di bawah 15 tahun, jumlah anak yang kurang dari 3 orang, serta variabel klasifikasi daerah tempat tinggal rumah tangga. Sedangkan variabel lainnya tidak signifikan.

Saran

Setelah melihat hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang bisa diberikan adalah yaitu :

1. Dari hasil estimasi diperoleh bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan secara signifikan, oleh karena itu untuk mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Maluku Utara hendaknya pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara lebih meningkatkan program pembangunan yang menitikberatkan pada bidang pendidikan.
2. Klasifikasi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, untuk itu hendaknya pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara hendaknya lebih memperhatikan pembangunan di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan.
3. Rumah tangga dengan jumlah anak kurang dari 3 orang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, oleh karena itu hendaknya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara lebih meningkatkan program keluarga berencana.
4. Jumlah anggota rumah tangga yang berumur kurang dari 15 tahun berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini memperkuat argumen pada poin ketiga tentang program keluarga berencana. Semakin banyak anak berusia di bawah 15 tahun akan memberikan peluang lebih besar kepada rumah tangga tersebut menjadi miskin.
5. Pekerjaan kepala rumah tangga pada sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, oleh karena itu hendaknya pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dapat lebih meningkatkan kesejahteraan petani sehingga bisa terlepas dari kemiskinan.

Rujukan

- Afandi, W. N. (2011). Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Nagari Malai V Suku).
- BPS. (2011). *Metodologi Penghitungan Kemiskinan*. Jakarta.
- Carey, K. (2002). State Poverty-Based Education Funding: A Survey Of Current Programs And Options For Improvement.
- Datt, G., & Jolliffe, D. (1999). Determinants of Poverty in EGYPT: 1997, (75).
- Gan, C., & Sanyal, A. (2010). The Determinants of Urban Household Poverty in Malaysia, 1124–1130.
- Geda, A. (2005). Determinants of Poverty in Kenya: A Household Level Analysis.
- LIPI. (2007). *Evaluasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia: Benang Kusut Masalah Kemiskinan dan Pengangguran*. Jakarta.
- Mankiw, G. (2010). *Macroeconomics* (Seven.). New York: Worth Publisher.
- Nicholson, W. (1992). *Microeconomics Theory: Basics Principles and Extensions*. (Fifth, Ed.). Dryden Press.
- Royat, S. (2009). Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, (1), 2005–2009.
- Schultz, T. (1971). *Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research*. New York: Free Press.
- Todaro, M., & Smith, S. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (8th ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- UN. (2011). *The Millennium Development Goals Report*. New York.
- Van Den Berg. (2001). *Economic Growth and Development*. McGraw-Hill.
- Wahid, A. (2008). Pendidikan versus Kemiskinan, 2.
- Woolard, I., & Klasen, S. (2004). Determinants of Income Mobility and Household Poverty Dynamics in South Africa, (1030).

Lampiran

Tabel 3 Hasil estimasi probit model dengan menggunakan software Stata versi 11

```
. probit d_miskin Year_Schooling d_Perempuan anak_2 umur umur_sqr klas_desa u_
> 15 u_60 d_pertanian d_tdk_kerja,robust
```

Iteration 0: log pseudolikelihood = **-1114.9434**
Iteration 1: log pseudolikelihood = **-941.37971**
Iteration 2: log pseudolikelihood = **-930.83915**
Iteration 3: log pseudolikelihood = **-930.8031**
Iteration 4: log pseudolikelihood = **-930.8031**

Probit regression

Log pseudolikelihood = **-930.8031**

Number of obs = 3702
Wald chi2(10) = 301.20
Prob > chi2 = 0.0000
Pseudo R2 = 0.1652

d_miskin	Coef.	Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Year_Schoo~g	-.066468	.010377	-6.41	0.000	-.0868066	-.0461294
d_Perempuan	-.0641449	.1239714	-0.52	0.605	-.3071243	.1788345
anak_2	-.2511614	.0810806	-3.10	0.002	-.4100764	-.0922464
umur	-.0153619	.0157931	-0.97	0.331	-.0463158	.015592
umur_sqr	.000137	.0001681	0.82	0.415	-.0001925	.0004666
klas_desa	.2504252	.0840764	2.98	0.003	.0856384	.415212
u_15	.255666	.0277458	9.21	0.000	.2012853	.3100468
u_60	.0209064	.0878517	0.24	0.812	-.1512799	.1930926
d_pertanian	.3686527	.0839117	4.39	0.000	.2041889	.5331166
d_tdk_kerja	.2507894	.1593208	1.57	0.115	-.0614737	.5630524
_cons	-1.288324	.4050445	-3.18	0.001	-2.082196	-.494451

Tabel 4 Marginal Effect Hasil Pengolahan Stata Versi 11

```
. margins, dydx( Year_Schooling d_Perempuan anak_2 umur umur_sqr klas_desa u_15
> u_60 d_pertanian d_tdk_kerja)
```

Average marginal effects

Model VCE : Robust

Expression : Pr(d_miskin), predict()
dy/dx w.r.t. : Year_Schooling d_Perempuan anak_2 umur umur_sqr klas_desa u_15
u_60 d_pertanian d_tdk_kerja

Number of obs = 3702

	dy/dx	Delta-method Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Year_Schoo~g	-.009016	.0013999	-6.44	0.000	-.0117597	-.0062722
d_Perempuan	-.0087009	.0168167	-0.52	0.605	-.041661	.0242593
anak_2	-.0340685	.011048	-3.08	0.002	-.0557223	-.0124148
umur	-.0020837	.0021447	-0.97	0.331	-.0062874	.0021199
umur_sqr	.0000186	.0000228	0.81	0.415	-.0000261	.0000633
klas_desa	.0339687	.011469	2.96	0.003	.0114898	.0564475
u_15	.0346796	.0037702	9.20	0.000	.0272901	.042069
u_60	.0028358	.0119234	0.24	0.812	-.0205336	.0262052
d_pertanian	.0500055	.011424	4.38	0.000	.027615	.0723961
d_tdk_kerja	.0340181	.0216482	1.57	0.116	-.0084116	.0764478